

IDENTIFIKASI
STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI KECAMATAN SUNGAIAMBAWANG
KABUPATEN KUBURAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh:

Abdul Rahman

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: areosyaka77@gmail.com

ABSTRACT

*This study aims to explain how the identification of strategies for improving people's welfare in Kecamatan Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya. The research method used descriptive method with qualitative approach. The method of collecting data from this research is interview, observation, and documentation study. Data analysis technique used in this research is data analysis technique model of Miles and Hubberman that is data reduction, display data and withdrawal of conclusion. The results are: **First**, the identification of physical infrastructure development strategy in order to improve the welfare of the people of Sungaiambawang sub-district is done through several things including: (1) strategy to improve the quality of planning, implementation and supervision of development in the regions and villages; (2) development strategy and development of fast growing area, that is program of development of industrial estate and public housing development; and (3) procurement strategy for trans trans shipment of Kalimantan and Kuburaya-Singkawang-Sambas silk road. **Second**, the identification of education development strategy in order to improve the welfare of the people of Sungaiambawang sub-district are: (1) providing 0 km basic education facilities and putting education personnel in remote areas; (2) adding vocational schools (3)) held a package program A and B to address the illiterate community. **Third**, the identification of health development strategy in order to improve the welfare of the people of Sungaiambawang sub-district are: to socialize and empower the community with participative approach.*

Keywords: *identify strategies, welfare community*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dalam upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya mengacu tujuan dari sila ke-lima Pancasila yang lebih menekankan pada prinsip keadilan sosial dan secara eksplisit konstitusinya pada pasal 27 dan 34 UUD 1945 yang mengamanatkan tanggungjawab pemerintah dalam

pembangunan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, amanat konstitusi tersebut belum sepenuhnya dipraktekkan secara konsekuen baik pada masa orde baru maupun era reformasi saat ini. Pembangunan kesejahteraan masyarakat dinilai hanya sebatas jargon dan belum terintegrasi dengan strategi pembangunan ekonomi karena penanganan kendala pembangunan

masih belum menyentuh persoalan mendasar. Hal ini tampak dari berbagai indikator pembangunan, antara lain kurangnya infrastruktur fisik, rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan, dan lain sebagainya.

Pemerintah dalam merumuskan strategi pembangunan telah banyak melakukan upaya diantaranya melalui program bantuan dan jaminan sosial, namun masih bersifat parsial serta belum didukung oleh kebijakan pemerintah yang mengikat. Kenyataan bahwa sampai saat ini orang miskin masih belum diperhatikan secara maksimal, walaupun dibantu hanya sebatas bantuan berupa uang, barang, pakaian atau makanan berdasarkan prinsip belas kasihan tanpa konsep dan visi yang jelas.

Masyarakat pada umumnya belum mengenal dengan baik mengenai arti pentingnya kesejahteraan masyarakat dan pemahaman yang jelas mengenai apa itu kesejahteraan masyarakat. Masyarakat cenderung mengartikan kesejahteraan masyarakat semata-mata sebagai kegiatan pemberian bantuan barang dan uang kepada kelompok masyarakat miskin atau rehabilitasi masyarakat yang dilakukan di panti-panti sosial seperti panti jompo, panti asuhan, panti karya wanita dan lain-lain. Padahal esensi pembangunan kesejahteraan sosial adalah sebagai kegiatan “pemberdayaan” masyarakat melalui pemberian modal usaha, penyediaan kredit mikro, pelatihan keterampilan usaha ekonomi produktif dan lain-lain.

Kesejahteraan masyarakat di bidang sosial pada dasarnya merupakan keadaan sosial yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat jasmani,

rohani dan sosial sesuai dengan hakekat dan martabat manusia untuk dapat mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi diri, keluarga dan masyarakatnya untuk berkembang menjadi lebih baik. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM bangsa Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan eksklusivisme yang dapat mengancam tatanan hidup bangsa Indonesia. Dimana kondisi demikian apabila diabaikan maka akan mengarah pada terjadinya konflik horizontal yang selanjutnya akan dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang sangat merugikan.

Pembangunan kesejahteraan bidang sosial oleh pemerintah di seluruh wilayah Indonesia memerlukan adanya suatu strategi yang sesuai dengan kondisi wilayah yang meliputi semua aspek potensi wilayah suatu daerah. Pentingnya perencanaan dan strategi ini dimaksudkan agar konsep kesejahteraan yang merupakan basis historis dan teoritis pembangunan kesejahteraan sosial relatif dapat berjalan secara maksimal.

Kabupaten Kuburaya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki permasalahan utama yang berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Sampai saat ini, memang banyak upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuburaya untuk mempercepat

pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kerjasama lintas sektoral maupun lintas kabupaten, propinsi dan Negara. Namun sampai dengan saat ini kondisi pembangunan kesejahteraan masyarakat masih jalan-jalan ditempat. Kompleksitas permasalahan pembangunan ditambah lagi dengan tuntutan perkembangan lingkungan internal dan eksternal menyebabkan pembangunan kawasan pedesaan di Kabupaten Kuburaya masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya strategi dan langkah kebijakan yang tepat dan sesuai sehingga potensi yang dimiliki dapat benar-benar dimanfaatkan bagi masyarakat di Kecamatan Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana identifikasi strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya?”.

LANDASAN TEORI

Manajemen Pemerintahan

Suradinata (2013: 21) mendefinisikan “manajemen pemerintahan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan Negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh Negara”. Inti manajemen pemerintahan terletak pada proses pergerakan untuk mencapai tujuan Negara, dimana terkait erat dengan fungsi kepanmongprajaan. Siagian dalam Nawawi (2013: 21), “manajemen pemerintahan adalah manajemen yang

ditetapkan dalam lingkungan aparatur pemerintahan atau aparatur negara, tidak saja diartikan sebagai aparatur dari badan eksekutif, tetapi juga aparatur dari badan legislatif dan yudikatif, serta baik yang berada pada tingkat pusat maupun tingkat daerah”. Secara normatif, tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar; menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemajuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Strategi Kesejahteraan Masyarakat

Nilasari (2014: 2) menyimpulkan strategi adalah sejumlah tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang diambil untuk mengeksploitasi kompetensi inti serta memperoleh keunggulan bersaing. Kegiatan yang terintegrasi dan terkoordinasi merupakan kegiatan kreatif tanpa akhir dari sumber daya manusia untuk mendapatkan daya ungkit sumber daya (*resource leverage*) yang lebih baik. Sedangkan mengeksploitasi kompetensi inti dimaksudkan atas penggunaan segala daya pengetahuan, keterampilan, pengalaman dari para pelaksana atau *teamwork* untuk keseluruhan tindakan yang diterapkan untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam kaitannya dengan tujuan negara untuk mensejahterakan masyarakatnya, maka strategi harus dipersiapkan dengan baik dengan berbagai indikator yang dipastikan mampu mensejahterakan masyarakat. Arsyad dkk (2011: 27) menguraikan 9 (Sembilan) indikator prasyarat untuk memecahkan permasalahan pembangunan di pedesaan, yaitu:

- a. Infrastruktur (fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan)
- b. Kondisi pendidikan
- c. Kondisi kesehatan
- d. Pembangunan pertanian
- e. Tingkat industrialisasi
- f. Perkembangan usaha non-pertanian
- g. Tingkat rawan bencana
- h. Aspek kelembagaan dan modal sosial
- i. Aspek sosial budaya

Masing-masing indikator pembangunan tersebut, memerlukan strategi yang tepat untuk mewujudkan, yang keseluruhannya bermuara kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya, tujuan politiknya dan memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri (Nasution, 2007: 18). Pengertian tersebut mengarahkan pada upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas yang mengisyaratkan perubahan kualitatif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemahaman ini lebih cenderung melihat pembangunan sumber daya manusia itu dari dua persepektif, yaitu persepektif pendidikan dan persepektif pemberdayaan.

Perspektif pendidikan, pembangunan sumber daya manusia adalah membantu masyarakat dan warga belajar menumbuhkan, mengembangkan kemampuan serta

peranan dirinya sebagai individu, anggota masyarakat dan umat Tuhan (Pidarta, 1997: 11). Perspektif pemberdayaan, pembangunan sumber daya manusia adalah upaya memberdayakan sumber daya manusia melalui tindakan-tindakan yang lebih konkrit yang dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan (Mubyarto, dalam Suryono, 2013: 147). Dalam kaitan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tersebut, maka pemberdayaan masyarakat merupakan peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat, untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal menuju masyarakat madani. Dalam pemberdayaan ini, terdapat tiga proses pentahapan pemberdayaan masyarakat yang perlu dilakukan, yaitu: tahap inisiasi; tahap partisipasi, dan tahap emansipasi (Suryono, 2013: 147).

Kesejahteraan Masyarakat

Desentralisasi yang member kewenangan lebih luas kepada daerah, kemudian dijadikan momentum untuk memangkas anggaran dan institusi-institusi sosial dan bahkan meniadakannya sama sekali. Alasannya: pembangunan kesejahteraan sosial dianggap boros dan karenanya baru perlu dilakukan apabila pertumbuhan ekonomi atau Pendapatan Asli daerah (PAD) telah tinggi. Padahal, studi di beberapa Negara menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi tidak secara otomatis dan linier berhubungan dengan pembangunan kesejahteraan sosial (Suharto, 2006: 85).

Segel dan Bruzy (dalam Kusnadi, 2013: 8) mengatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat yang meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan

kualitas hidup rakyat. Midgley (dalam Sutomo, 2006: 12) memperjelas bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun atas tiga unsur yaitu: pertama, setinggi apa masalah sosial dikendalikan; Kedua, seluas apa kebutuhan dipenuhi, dan Ketiga, setinggi apa kesempatan bagi individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan memecahkan masalah ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni sampel penelitian yang diambil bukan bergantung pada jumlah populasi tetapi disesuaikan dengan tujuan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan proses reduksi data, display data, dan verifikasi data.

PEMBAHASAN

Identifikasi Strategi Pembangunan Infrastruktur Fisik untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya

Diketahui bahwa, strategi pembangunan infrastruktur fisik merupakan langkah-langkah berisikan program-program pembangunan fisik yang bermaksud menyediakan sarana dan prasarana penunjang terlaksananya pembangunan. Prasarana merupakan hal yang sangat penting dalam upaya memberikan pelayanan umum kepada masyarakat baik oleh pemerintah maupun swasta. Sebagai salah satu rencana pembangunan tahunan pemerintah secara

nasional, maka penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur fisik merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah, sedangkan tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur fisik suatu daerah merupakan hak bagi masyarakat yang diatur serta dijalankan oleh setiap pemerintah daerah. Secara nasional kegiatan pokok strategi pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2018 meliputi energi kelistrikan, transportasi dan infrastruktur lainnya.

Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di Kabupaten Kuburaya (KKR) memang masih belum baik, jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Propinsi Kalimantan Barat. Karena kebijakan pembangunan untuk percepatan pembangunan baru dimulai tahun 2007 saat KKR dimekarkan dari Kabupaten Pontianak. Disparitas pembangunan di semua sektor memang tampak mencolok dibandingkan dengan Kota Pontianak. Pembangunan sarana transportasi, komunikasi, dan air bersih memerlukan perhatian yang khusus agar kecamatan dan pedesaan di KKR bisa tumbuh dan menjadi generator penggerak perekonomian.

Berdasarkan data tabel 1, maka dapat diidentifikasi sebuah permasalahan bahwa: Terdapat 46 % jalan desa yang menghubungkan antar desa di Kecamatan Sungaiambawang masih berupa jalan tanah yang sulit dilalui oleh kendaraan. Terdapat 38 % jalan desa yang telah mendapat pengerasan krikil dan serti. Terdapat 16 % jalan beraspal yang dinikmati oleh masyarakat Kecamatan Sungaiambawang. Dengan keadaan ini ada beberapa desa masih terisolasi di Kecamatan Sungaiambawang karena faktor infrastruktur jalan yang rusak.

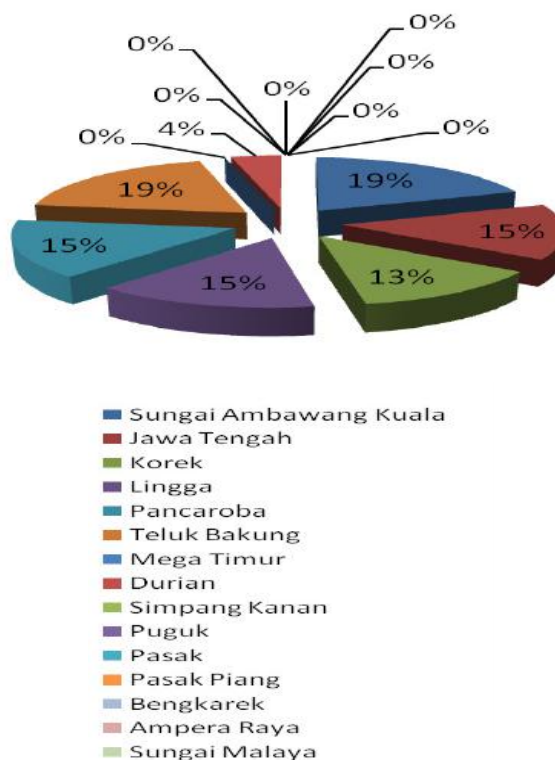
Tabel 1
Keadaan Infrastruktur Jalan, Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Kecamatan Sungaiambawang

NO	NAMA DESA	JENIS PERMUKAAN JALAN		
		DIAS-PAL	DIPER-KERAS	TANAH
1.	Sungaiambawang Kuala	24	45	54
2.	Jawa Tengah	18	34	23
3.	Korek	16	12	21
4.	Lingga	18	13	15
5.	Pancaroba	19	12	16
6.	Telukbakung	23	12	34
7.	Mega Timur	0	56	29
8.	Durian	5	23	23
9.	Simpangkanan	0	23	26
10.	Puguk	0	17	34
11.	Pasak	0	12	23
12.	Pasakpiang	0	13	18
13.	Bengkarek	0	15	26
14.	Amperaraya	0	0	0
15.	Sungaimalaya	0	0	0
JUMLAH		123	287	342
Persentase		16 %	38 %	46 %

Sumber: Profil Kecamatan Sungaiambawang tahun 2017

Berdasarkan gambar di atas, masih terdapat 8 (delapan) desa yang memiliki jalan yang tidak memadai dari segi pengaspalan. Desa yang paling tinggi telah menikmati jalan beraspal adalah Desa Sungaiambawang Kuala dan Desa Telukbakung masing-masing sebesar 19%, disusul Desa Jawa Tengah, Lingga dan Pancaroba yang kedua masing-masing sebesar 15%, Desa Korek 13%, dan Desa Durian 4%, umumnya desa-desa ini telah menikmati jalan beraspal karena dilewati jalan poros Trans Kalimantan dari Desa Sungaiambawang Kuala sampai ke Kabupaten Sanggau. Sementara itu masih

ada 8 (delapan) desa yang belum sama sekali menikmati jalan aspal yaitu yang ditunjukkan pada gambar 1 bertulis 0%. Desa-desa tersebut adalah Desa Mega Timur, Simpang kanan, Puguk, Pasak, Pasak Tiang, Bengkarek, Ampera Raya dan Sungai Melaya.



Gambar 1
Persentase Desa yang Menikmati Jalan Aspal Kecamatan Sungaiambawang

Sumber: Diadopsi dari Profil Kecamatan Sungaiambawang tahun 2017

Pernyataan Camat Sungaiambawang terkait pembangunan jalan di Kecamatan Sungaiambawang bahwa:

“Kita berupaya untuk berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga supaya menganggarkan dan memprioritaskan pembangunan jalan di wilayah desa-desa yang masih terisolasi karena tidak memadainya jalan. Berbagai cara telah kami lakukan untuk bisa memperbaiki

jalan untuk membuka keterisolasian ... khususnya bagi daerah atau desa-desa yang belum sama sekali menikmati jalan pengerasan dan aspal” (WWC, 25/12/2017).

Berdasarkan pernyataan tersebut, sebetulnya upaya untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan jalan di Kecamatan Sungaiambawang telah sering dilakukan oleh pemerintah Kecamatan dengan Kabupaten/Kota melalui Dinas Bina Marga Kabupaten Kuburaya, agar memprioritaskan pembangunan jalan khususnya pada daerah-daerah yang belum menikmati jalan yang beraspal di Kecamatan Sungaiambawang.

Selanjutnya, Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Kuburaya Chairil Rahmi menyatakan:

“... dari total target pembangunan infrastruktur di Kuburaya sekitar 526 kilometer, sepanjang tahun 2016, kami baru dapat merampungkan pembangunan dan pemeliharaan jalan sepanjang 128 kilometer lantaran keterbatasan anggaran. Memang untuk saat ini kami memang menggunakan dana dari DAU atau DAK, APBN murni, serta sumber dana dari pihak ketiga, untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan yang sudah kami lakukan di 9 (Sembilan) kecamatan di Kuburaya. Selama dua tahun terakhir, anggaran yang digunakan untuk membangun infrastruktur berasal dari anggaran DAK sebesar Rp 146 miliar dan DAU sebesar Rp 179-an miliar” (WWC, 23/12/2017).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan masih banyak kendala, salah satunya adalah keterbatasan anggaran. Mengingat

keadaan keuangan negara pada saat ini diperkirakan untuk dapat merampungkan perbaikan jalan sepanjang 526 kilometer membutuhkan waktu sekitar 3 - 5 tahun ke depan bahkan lebih. Selama dua tahun terakhir, anggaran yang digunakan untuk membangun infrastruktur berasal dari anggaran DAK dan DAU.

Menurut M. Zaini, Camat Sungaiambawang, strategi utama untuk pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sungaiambawang mengingat keterbatasan anggaran adalah dengan mengoptimalkan atau peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah dan desa, sebab yang memiliki anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan itu adalah pemerintah Kabupaten/kota melalui Dinas Bina Marga dan Desa yang memiliki dana desa yang berasal dari APBN yang prioritas utama penggunaan dana desa tersebut adalah untuk membangun infrastruktur jalan dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara hasil studi dokumen penyelarasan program pembangunan infrastruktur jalan oleh Dinas Bina Marga di Kecamatan Sungaiambawang tahun 2017 masih berada di lingkungan Desa Sungaiambawang Kuala sebagai ibu kota kecamatan dan berada berbatasan langsung dengan Kota Pontianak. Seperti terlihat pada tabel 2.

Dari tabel 2, rencana pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Kecamatan Sungaiambawang hanya bidang pembangunan desa yaitu pembangunan jalan lingkungan dan pembangunan saluran yang dikelola oleh SKPD Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kota. Hal ini mengingat letak geografis desa Sungaiambawang Kuala

yang berbatasan langsung dengan Kota, dan secara fisik telah menjadi kota yang sangat padat dengan aktivitas perkotaan. Sementara desa pun mempersiapkan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang diprioritaskan pada bidang pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2

Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Masuk ke Desa Sungaiambawang Kuala Tahun 2017

No	Program/ Kegiatan	SKPD Pengelola Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp)
1	Pekerjaan Jalan lingkungan	Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kota	Parit Adam 2 RT 002/RW 004	500 m x2.5m	1	93,000,000
2	Pekerjaan Jalan lingkungan	Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kota	GG. Budaya RT 01/RW01	1300 m x 4m	1	139,500,000
3	Pekerjaan Jalan lingkungan	Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kota	Parit Adam	2.5 m x 700 m	1	100,000,000
4	Pekerjaan Jalan lingkungan	Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kota	JL. Alam bana makmur	2000 m	1	186,000,000
5	Pembangunan Saluran	Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kota	JL Manunggal RT 02 RW 01	300 m x 3 m	1	186,000,000
6	Pembangunan Saluran	Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kota	RT 07 RW 10	1 paket	1	93,000,000
7	Pembangunan Saluran	Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kota	GG. Budaya RT 01/RW01	2.5 m x 150	1	139,500,000
Jumlah						Rp 937,000,000

Sumber: RPJM Desa Sungaiambawang Kuala 2017

Melalui strategi peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di daerah dan desa. Melalui strategi tersebut pemerintah Kecamatan melakukan koordinasi pembangunan baik dengan pemerintah Kabupaten/kota maupun dengan pemerintahan desa terkait mengenai pembangunan infrastruktur yang berada diwilayah Kecamatan Sungaiambawang Kuala. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan melalui Musrebangdes di tingkat desa dan Musrebang Kecamatan, serta Musrebang Kabupaten/kota.

Selain itu, pemerintah Kecamatan juga dapat menjadi tempat aduan masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan daerah dan desa yang dikerjakan oleh

pihak kontraktor, oleh karena itu strategi yang dapat diambil oleh pihak kecamatan adalah mengembangkan pusat aduan masyarakat melalui sms. Dengan sms tersebut, masyarakat tidak perlu susah-susah untuk datang ke kantor Kecamatan untuk melaporkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pemerintah Kecamatan Sungaiambawang sangat terbuka dan responsif terhadap segala aduan yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan evaluasinya terhadap kinerja pelaksana pembangunan di Kecamatan sungai Ambawang.

Pemerintah melalui Kepala Dinas Bina Marga sangat apresiatif dan terbuka terhadap segala bentuk aduan

dan laporan masyarakat, sebab dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat secara tidak langsung dapat memacu pihak pelaksana untuk melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan juga dapat memacu inovasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya pengawasan dari berbagai pihak, otomatis turut memperkecil kerugian Negara atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kuburaya mengalokasikan anggaran sekitar Rp 60 miliar untuk pembangunan jalan lingkungan dengan sistem imbal swadaya di setiap RT mulai tahun 2017. Dengan penganggaran Rp 60 miliar tersebut, masing-masing RT di Kuburaya mendapatkan material semen masing-masing 300- 400 sak semen untuk pembangunan jalan lingkungan.

Selanjutnya mengenai sektor penerangan wilayah Kecamatan Sungaiambawang yaitu listrik. Listrik merupakan suatu sarana vital dalam aktivitas kehidupan keseharian dan aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Pada Kecamatan Sungaiambawang ternyata masih adanya 1 (satu) desa di Kecamatan Sungaiambawang yang tidak masuk listrik yaitu Desa Telukbakung. Desa ini selama 70-an tahun Indonesia merdeka, hampir seluruh warga Desa Telukbakung Kecamatan Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya, tidak pernah merasakan pasokan listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (<http://pontianak.tribunnews.com/2015/08/17/70-tahun-tanpa-listrik-warga-merasa-belum-merdeka>). Diakses 3 Juli 2018. Pukul 11:43 AM).

Hal ini memang sangat krusial di Desa Telukbakung dalam pembangunan infrastruktur. Terutama listrik, 7 dusun yakni

Teluklais, Lintangbatang, Bawaslestari, Enggang Raya, dan Gunungbenuah belum menerima pasokan listrik. Dua dusun lainnya, yaitu Dusun Gunungloncek dan Dusun Re'es telah menikmati pasokan listrik PLN, yaitu Dusun Teluklais dan Lintangbatang. Berdasarkan observasi di Desa Telukbakung Kampung Jering dari Kilometer 48 Lintangbatang sampai Kilometer 74 Gunungbenuah, tak teraliri listrik. Tidak ada tanpak pemandangan tiang-tiang listrik di sisi jalan yang biasa kita lihat pada desa-desa yang lainnya.

Desa Telukbakung merupakan hasil pemekaran Desa Pancaroba, berdasarkan Perda Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2005. Luasnya sekitar 57.300 hektare. Pemerintahan desa berusaha terus mengajukan proposal kepada PT PLN, agar Desa Telukbakung dapat dialiri listrik. Pemerintah Kecamatan Sungaiambawang pun telah berupaya membantu warganya supaya mendapatkan pelayanan penerangan listrik dengan membuat proposal dan mengajukan ke Gubernur dan DPRD Propinsi Kalimantan Barat.

Dengan demikian dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sungaiambawang yaitu lebih kepada permasalahan jalan dan jembatan, serta permasalahan penerangan listrik di salah satu Desa yaitu Desa Telukbakung Kecamatan Sungaiambawang. Adapun strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kecamatan Sungaiambawang beserta pemerintah kabupaten/kota melakukan identifikasi strategi yang tepat untuk melakukan pembangunan infrastruktur fisik ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sungaiambawang.

Pertama, melalui strategi peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di daerah dan desa. Melalui strategi tersebut pemerintah Kecamatan melakukan koordinasi pembangunan baik dengan pemerintah Kabupaten/kota maupun dengan pemerintahan desa terkait mengenai pembangunan infrastruktur yang berada diwilayah Kecamatan Sungaiambawang Kuala. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan melalui Musrebangdes di tingkat desa dan Musrebang Kecamatan, serta Musrebang Kabupaten/kota.

Ketersediaan infrastruktur terhadap masyarakat di desa-desa harus segera diperhatikan oleh pemerintah, namun harus betul-betul mencerminkan kebutuhan masyarakat di desa. Artinya harus ada *political will* dari pemerintah dan bukan sekedar janji-janji saja tetapi lebih kepada tindakan nyata, karena selama ini tindakan dari pemerintah dan swadaya masyarakat sangat lamban. Hal ini masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat dan daerah sebagai memegang kunci keberhasilan pembangunan di desa yaitu melalui Dana Desa.

Selanjutnya, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di bidang pekerjaan umum (PU) di Kecamatan Sungaiambawang diarahkan untuk membuka permasalahan ketertinggalan. Penyediaan penerangan listrik supaya dapat dipenuhi. Sehubungan dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah melalui program pembangunan dan pengembangan kecamatan ternyata membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kec. Sungaiambawang. Akan tetapi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kec. Sungaiambawang juga tidak selaras

dengan pemerataan pendapatan dan tidak akan membawa dampak yang berarti bagi masyarakat secara luas. Perlu adanya keterpaduan antara program pemerintah dengan peran swasta dan masyarakat. Hal ini perlu diperhatikan guna menyelaraskan langkah dalam menggali sektor-sektor potensial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

Selain itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah menyangkut penyediaan arus informasi seperti menara telekomunikasi sehingga sinyal telekomunikasi dapat ditangkap dengan kuat, dengan demikian dapat berpengaruh kepada akses informasi menjadi lancar. Pembangunan infrastruktur guna membuka keterbelakangan dan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru harus sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, artinya masuknya sektor swasta untuk membangun daerah pedesaan di Kecamatan Sungaiambawang diharapkan tidak mematikan perekonomian masyarakat setempat.

Kedua, strategi pengembangan dan pembangunan kawasan cepat tumbuh, yaitu program pembangunan kawasan industri dan pembangunan perumahan rakyat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membawa peningkatan produktivitas masyarakat dengan tujuan akhir peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan. Dari survey yang dilakukan dan data yang telah dipublikasikan secara resmi oleh pemerintah menunjukkan bahwa beberapa desa di Kecamatan Sungaiambawang umumnya merupakan desa tertinggal. Pernyataan dari Kepala Bappeda Kabupaten Kuburaya bahwa: berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuburaya untuk mengatasi

ketertinggalan adalah dengan membangun jalan dan jembatan, membangun sarana angkutan pedesaan, membangun sarana informasi dan telekomunikasi dan sarana penerangan listrik.

Secara umum dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang merata bagi semua, Pemerintah Kabupaten Kuburaya melakukan beberapa kegiatan yang dianggap dapat mendongkrak pembangunan di Kabupaten Kuburaya dan Kecamatan Sungaiambawang khususnya adalah dengan pembangunan kawasan industri Ambawang dan pembangunan infrastruktur jalan yang akan menghubungkan dengan desa-desa terpencil yang memiliki potensi pertanian.

Sebagai akibat adanya pengembangan berbagai infrastruktur fisik di Kecamatan Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya maka sudah jelas akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dampak yang ditimbulkan sebagai konsekuensi adanya pengembangan infrastruktur fisik tersebut tidak selamanya bersifat positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak selamanya bersifat positif disebabkan karena dampak tersebut merupakan prediksi akan adanya perubahan pola-pola kehidupan masyarakat yang cenderung menggeser nilai-nilai tatanan sosial masyarakat itu sendiri.

Ketiga, strategi pengadaan transportasi yang diadakan untuk trayek jalan poros Trans Kalimantan dan jalan sutra Kuburaya-Singkawang-Sambas. Dengan kemudahan dan kelancaran transportasi akan berdampak

terhadap tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat karena hasil-hasil pertanian dapat diangkut dengan mudah dan dapat dijual ke pasar dengan cepat. Kecamatan Sungaiambawang memiliki lokasi yang sangat strategis yang dilalui oleh jalur sutra Supadio – Singkawang atau Supadio-Sintang dan jalan poros Trans Kalimantan yang menghubungkan antar negara akan mempermudah pembangunan dengan berbagai peralatan pendukung, meminimalisir dampak lingkungan dan penetapan industri yang lebih sederhana.

Sehubungan dengan potensi tersebut faktor keamanan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah karena hal tersebut akan menyangkut kelancaran dalam seluruh aktivitas sosial perekonomian masyarakat di Kecamatan Sungaiambawang. Tingginya kegiatan perekonomian di Kecamatan Sungaiambawang merupakan modal dasar yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, namun hal penting yang perlu dicatat adalah kegiatan perekonomian pertukaran arus barang dan jasa melewati jalur sutra antar negara banyak membawa barang-barang selundupan, kondisi ini sangat merugikan negara.

Pembangunan infrastruktur, kaitannya dengan jasa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang memadai adalah salah satu syarat tercapainya tujuan pembangunan, terutama pembangunan ekonomi. Infrastruktur yang baik menciptakan akses yang lebih murah kepada masyarakat baik berupa akses transportasi, jalan dan jembatan, komunikasi dan energi. Hampir semua literatur pembangunan mengakui bahwa infrastruktur berfungsi sebagai katalis

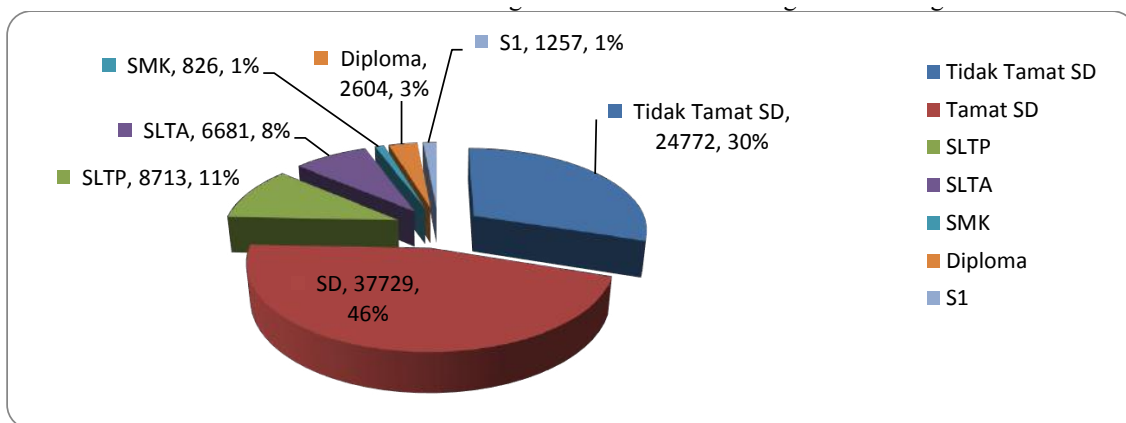
bagi pembangunan yang tidak saja dapat meningkatkan akses terhadap sumberdaya, tetapi juga dapat meningkatkan efektivitas intervensi pemerintah (Arsyad, dkk, 2011: 88).

Strategi Pembangunan Pendidikan untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya

Data statistik dan studi emperis memperlihatkan bahwasanya bukan hanya pengembangan modal fisik yang mampu menstimulasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun pengembangan modal manusia (*human capital*) juga dinilai mampu menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu jalan untuk mengakumulasi modal manusia selain asfek kesehatan adalah asfek pendidikan (Arsyad, dkk, 2011: 46).

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan pembimbingan, pengajaran dan latihan bagi peranan seseorang di masa yang akan datang. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah maupun kerjasama dengan pihak swasta dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang merata dan bermutu kepada masyarakat. Akan tetapi pada saat ini pembangunan bidang pendidikan masih menghadapi berbagai permasalahan yang mengakibatkan belum meratanya penyediaan layanan pendidikan, rendahnya kualitas dan relevansi hasil pendidikan, serta lemahnya pelaksanaan manajemen sistem pendidikan nasional.

Permasalahan pembangunan sektor pendidikan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari dokumen di Kec. Sungaiambawang terlihat dalam gambar berikut.

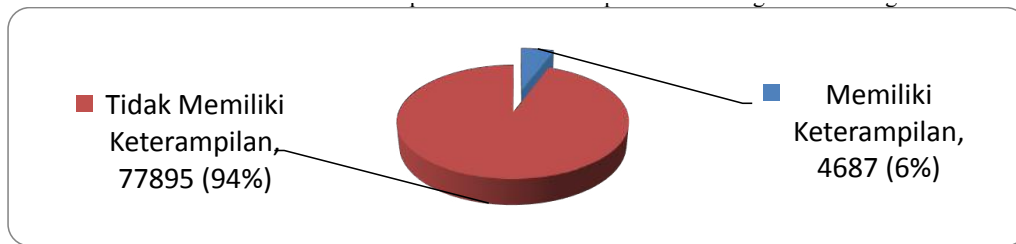


Gambar 2
Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kec. Sungaiambawang

Sumber: diadopsi dari Profil Kecamatan Sungaiambawang tahun 2017

Berdasarkan data dalam gambar di atas, persentase tertinggi tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Sungaiambawang adalah tamat Sekolah Dasar (SD) dengan persentase 46 %. Disusul tidak tamat SD 30 %. SLTP 11

%, SLTA 8 %, SMK 1 %, Diploma 3 %, dan Sarjana 1 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat Kecamatan Sungaiambawang sangat rendah. Berikut adalah gambaran rendahnya keterampilan



Gambar 3

Keadaan Penduduk Terampil dan Tidak Terampil di Kec. Sungaiambawang
 Sumber: diadopsi dari Profil Kecamatan Sungaiambawang tahun 2017

masyarakat Kecamatan Sungaiambawang, seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut.

Berdasarkan data, 94 % penduduk tidak memiliki keterampilan, dan hanya 6 % penduduk yang memiliki keterampilan. Umumnya masyarakat yang tidak memiliki keterampilan tersebut adalah yang memiliki tingkat pendidikan SMA ke bawah yang diprediksi tidak memiliki *skill* atau keterampilan tertentu. Sedangkan masyarakat yang memiliki keterampilan adalah mereka yang masuk pendidikan ke SMK, Diploma dan Universitas.

Terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat, upaya kerjasama dengan pihak sekolah telah dilakukan oleh pihak Kecamatan Sungaiambawang agar mau masuk ke SMK agar mereka dapat memiliki *skill* tertentu yang dapat mereka terima di bangku sekolah kejuruan. *Mintset* berpikir bahwa SMA jauh lebih baik dari SMK harus dapat diubah dengan adanya sosialisasi ke sekolah-sekolah dan masyarakat, agar anak-anak dan orang tuanya memahami pentingnya masuk ke SMK. Kepala UPT Dikdas Kecamatan Sungaiambawang mengakui bahwa kurangnya minat anak melanjutkan sekolah ke SMK lebih karena faktor kurangnya jumlah sekolah

SMK, kurangnya sosialisasi serta kurang memadainya kelas dan kurang meratanya penempatan guru. Berikut ini adalah data keadaan tenaga pendidik dan peserta didik Sekolah Dasar dan SLTP di Kecamatan Sungaiambawang.

Tabel 3

Keadaan Pendidikan di Kecamatan Sungaiambawang

Pendidikan	SD/MI	SMP/MTs	Jumlah
Sekolah	50	20	70
Siswa	6.088	2.896	8.984
Guru	506	289	795
Rasio Murid/guru	1: 12	1: 10	1: 11

Sumber: UPTDikdasKecamatanSungaiambawang

Terlihat pada tabel 3, perkembangan terakhir (tahun 2017) jumlah siswa dan guru menurut tingkat pendidikan di Kecamatan Sungaiambawang menunjukkan perkembangan pendidikan yang cukup baik. Ini terlihat dari rasio guru dengan siswa di Kecamatan Sungaiambawang menggambarkan 1 orang guru melayani 12 murid untuk Sekolah Dasar, dan 1 orang guru melayani 10 murid untuk SLTP. Namun itu dilihat secara keseluruhan tanpa memandang keberadaannya di kota atau di desa terpencil.

Berdasarkan perbandingan jumlah guru dan jumlah siswa sebenarnya sudah sangat ideal, terlepas tanpa memperhitungkan atau membedakan status guru yang PNS dengan yang Non-PNS. Permasalahan pendidikan di Kecamatan Sungaiambawang lebih karena kurang pemerataan guru dan ruang kelas di daerah-daerah terpencil, dimana guru lebih banyak menumpuk di perkotaan dan daerah tertentu yang mudah terjangkau. Tetapi sangat kurang ditempatkan di desa-desa terpencil. Begitu juga dengan gedung atau ruangan kelas di desa-desa seadanya saja dan kurang terurus.

Selain itu, sebenarnya daya tampung kelas sudah memadai namun, masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena alasan tidak ada biaya atau faktor kemiskinan. Terkait mengenai temuan ini, dinyatakan oleh Camat Sungaiambawang bahwa: “pemerintah sebenarnya cukup memperhatikan anak-anak yang mau bersekolah, namun tidak mampu dari segi pembiayaan, namun masyarakat enggan untuk mengurus dan lebih memilih untuk berhenti sekolah. Faktor budaya yang malas turut menjadi faktor penyebab rendahnya tingkat pendidikan di Kecamatan Sungaiambawang” (WWC, 25/12/2017).

Berdasarkan studi dokumen dan hasil wawancara, dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan bidang pendidikan lebih disebabkan karena: (1) faktor budaya dan kemiskinan yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah, (2) kurangnya sosialisasi untuk melanjutkan pendidikan ke SMK sehingga skill masyarakat rendah dan (3) kurang meratanya penempatan guru dan ruang kelas di desa-desa terpencil.

Strategi pembangunan sektor pendidikan dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana strategi serta dampak pembangunan sektor pendidikan. Berdasarkan temuan penelitian, identifikasi pembangunan sektor pendidikan di Kecamatan Sungaiambawang, tidak terlepas dari pengaruh masalah ekonomi yang dialami oleh masyarakat, salah satunya adalah masalah kemiskinan yang berdampak langsung terhadap terciptanya kondisi pendidikan yang rendah.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang tertua di dunia seperti perjudian dan prostitusi, boleh dikata sejak manusia mengenal kebutuhan ekonomi maka masalah ekonomi selalu diderita oleh manusia yang tingkat produksinya rendah termasuk karena letak geografisnya. Faktor penyebab kemiskinan berdasarkan hasil penelitian pada masyarakat di pedesaan lebih banyak berkaitan dengan ketidakseimbangan antara unsur potensi alam dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM) atau adanya hambatan eksternal dan internal.

Hambatan eksternal biasanya disebabkan karena tidak berdayaan masyarakat untuk memanfaatkan potensi alam karena tidak adanya alat transportasi untuk memasarkan hasil pertaniannya. Sedangkan hambatan yang bersifat internal adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia termasuk budaya gampang menyerah menyebabkan masyarakat cenderung malas bekerja dan terjadilah kemiskinan kultural yaitu kemiskinan terjadi bukan karena tidak adanya sumber daya alam tetapi karena masyarakatnya malas bekerja.

Strategi yang tepat untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kecamatan Sungaiambawang adalah

menyediakan fasilitas pendidikan dasar 0 km dan menempatkan tenaga pendidikan di daerah-daerah yang terpencil, serta berupaya menambah sekolah-sekolah kejuruan (SMK) yang mengajarkan berbagai ilmu yang melatih keterampilan.

Strategi ini dinilai tepat karena kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Sungaiambawang yang masih terbelakang dan berada dalam garis kemiskinan absolut. Ketersediaan sekolah SMK dan SMA di Kecamatan Sungaiambawang sangat minim. Bahkan, tidak semua desa di Kecamatan Sungaiambawang memiliki sekolah SMP, sehingga ini menggambarkan akses warga desa ke pelayanan pendidikan masih jauh. Semakin pendek jarak desa ke fasilitas pendidikan, semakin besar akses warga desa ke pelayanan pendidikan (Arsyad, dkk, 2011: 47).

Selain itu, melihat masih tingginya angka masyarakat Kecamatan Sungaiambawang yang putus sekolah maka perlu diadakan program paket A dan B untuk mengatasi masyarakat yang buta huruf. Dengan berbagai upaya sumber daya manusia yang tinggal di Kecamatan Sungaiambawang dapat meningkat dan outcomenya adalah terlepasnya masyarakat dari keterbelakangan dan ketertinggalan. Selain program paket A dan Paket B, pemerintah perlu mengupayakan diadakan kursus-kursus bagi kelompok pemuda di desa untuk memberikan bekal keterampilan seperti bengkel, budidaya pertanian, menjahit dan lain-lain.

Strategi Pembangunan Kesehatan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya

Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi masyarakat Kecamatan Sungaiambawang yang optimal. Setiap individu berkewajiban ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat diselenggarakannya upaya kesehatan dengan pendekatan peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*) penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Dalam upaya melaksanakan dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melalui kewenangan wajib yang diberikan melalui pelayanan tingkat pertama, maka ukuran yang digunakan adalah tercapainya urusan wajib bidang kesehatan yang tercantum dalam Standar Pelayanan Minimal yang telah dikeluarkan Kementerian Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. 004 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan.

Pelayanan publik acapkali menimbulkan ketidakpuasan masyarakat adalah peran pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Seringkali pertolongan darurat yang cukup penting dan sangat dibutuhkan tetapi tidak tersedia pelayanan yang memadai. Dalam situasi seperti ini warga mengambil beberapa langkah: *Pertama*, warga Kecamatan Sungaiambawang mengirim pasiennya ke Sungaiambawang Kuala atau ke Pontianak dengan jarak tempuh cukup jauh. *Kedua*, warga mengirim pasiennya ke kecamatan tetangga yaitu di Kecamatan Tayan Kabupaten Sangau. *Ketiga*, warga menyerahkan urusan ini pada perawat-

perawat yang tersedia di desa dengan peralatan apa adanya.

Kondisi kesehatan masyarakat di Kecamatan Sungaiambawang secara umum berkaitan dengan permasalahan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan kondisi wilayah desa-desa yang luas dan tersebar, serta kondisi prasarana jalan yang masih kurang mendukung, masyarakat masih sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik dari puskesmas maupun rumah sakit, mereka harus menempuh perjalanan sampai ke ibu kota kecamatan barulah mendapatkan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan data, Puskesmas di Kecamatan Sungaiambawang ada dua buah yaitu yang berada di Desa Sungaiambawang Kuala dan yang berada di Desa Lingga. Puskesmas pembantu (Pustu) dan Polindes sudah tersedia di setiap desa. Namun masih ada dua desa yang belum memiliki sarana fasilitas kesehatan yaitu desa Ampera Raya dan Desa Sungai Malaya. Karena desa-desa di Kecamatan Sungaiambawang tergolong luas dan memiliki jarak tempuh yang jauh-jauh, pelayanan Puskesmas yang hanya berjumlah dua buah belum mencukupi untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pada bidang kesehatan.

Tabel 4
Keadaan Sarana Kesehatan Kecamatan Sungaiambawang

NO	NAMA DESA	NAMA FASILITAS				
		PUSKES- MAS	PUSTU	POS YANDU	POLIN- DES	POSKES- DES
1.	Sungaiambawang Kuala	1	1	4	1	1
2.	Jawa Tengah	0	1	2	1	1
3.	Korek	0	1	2	1	1
4.	Lingga	1	1	1	1	1
5.	Pancaroba	0	1	1	1	1
6.	Telukbakung	0	1	1	1	1
7.	Mega Timur	0	1	1	1	1
8.	Durian	0	1	1	1	1
9.	Simpang-kanan	0	1	1	1	1
10.	Puguk	0	1	1	1	1
11	Pasak	0	1	1	1	1
12	Pasakpiang	0	1	1	1	1
13	Bengkarek	0	1	1	1	1
14	Amperaraya	0	0	0	0	0
15	Sungaimalaya	0	0	0	0	0
JUMLAH		2	13	18	13	13

Sumber: Profil Kecamatan Sungaiambawang tahun 2017

Tabel 5
Keadaan Sarana Kesehatan Kecamatan Sungaiambawang

NO	NAMA DESA	JUMLAH TENAGA KESEHATAN			
		DOK-TER	BI-DAN	MANTRI KESEHATAN/PERAWAT	DUKUN BAYI TERLATIH
1.	Sungaiambawang Kuala	1	5	9	1
2.	Jawa Tengah	0	2	0	1
3.	Korek	0	1	0	1
4.	Lingga	1	3	7	1
5.	Pancaroba	0	1	0	1
6.	Telukbakung	0	1	0	1
7.	Mega Timur	0	1	0	1
8.	Durian	0	1	0	1
9.	Simpang-kanan	0	1	0	1
10.	Puguk	0	1	0	1
11.	Pasak	0	1	0	1
12.	Pasak Piang	0	1	0	1
13.	Bengkarek	0	1	0	1
14.	Amperaraya	0	0	0	0
15.	Sungaimalaya	0	0	0	0
JUMLAH		2	20	16	13

Sumber: Profil Kecamatan Sungaiambawang tahun 2017

Petugas kesehatan dokter biasanya berpraktik di Puskesmas, Mantri kesehatan dan Bidan Desa biasanya berpraktik di Pustu/Polindes, namun tidak semua desa tersedia mantri kesehatan. Berikut adalah keadaan sarana kesehatan Kecamatan Sungaiambawang.

Rendahnya kualitas pelayanan publik yang minim terjadi di Kecamatan Sungaiambawang disebabkan oleh beberapa faktor. Di satu pihak, jumlah SDM yang sangat terbatas dan tingkat kehadiran SDM yang telah tersedia di kantor-kantor pemerintahan seringkali menjadi faktor

utama. Kemudian, kondisi infrastruktur kesehatan di Kecamatan Sungaiambawang masih jauh dari harapan, salah satu yang krusial adalah masalah infrastruktur jalan dan pusat pelayanan kesehatan yang jauh dari tempat warga masyarakat tinggal. Kurangnya dan kesulitan akses jalan dan pusat pelayanan kesehatan tersebut menimbulkan kesan bahwa pemerintah kurang perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di desa-desa terpencil memerlukan perhatian

lebih dari pemerintah, hal ini dikarenakan masyarakat di desa-desa yang jauh menjadi miskin dan terbelakang bukan sepenuhnya dikarenakan karena faktor kemiskinan absolute yaitu keadaan miskin diakibatkan ketidakmampuan seseorang atau kelompok orang memenuhi kebutuhan pokoknya seperti: makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi dan lain-lain yang biasanya diukur melalui garis kemiskinan (*property line*) yang pada umumnya dikonversikan dalam bentuk pendapatan atau pengeluaran. Namun lebih dikarenakan faktor kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakberesan atau ketidakadilan struktur, baik struktur politik, sosial maupun ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang atau kelompok orang menjangkau sumber-sumber penghidupan yang sebenarnya tersedia.

Camat Sungaiambawang mengaris-bawahi bahwa Masyarakat di desa-desa Kecamatan Sungaiambawang jika dilihat dari kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pada dasarnya cukup baik, dalam arti untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari mereka tidak terlalu sulit, namun keterbelakangan di daerah ini adalah kurangnya pendidikan, kesehatan, informasi dan aksesibilitas warga sehingga kurang peduli dengan hal-hal tersebut.

Walaupun demikian tidak menampik bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di desa-desa juga dipengaruhi oleh faktor kultural, atau kemiskinan kultur yaitu mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan (masyarakat modern), sikap malas tidak memiliki kebutuhan berprestasi (*need for achievement*), fatalis berorientasi ke masa lalu, tidak memiliki

jiwa wirausaha merupakan ciri kemiskinan kultural. Sebagaimana hasil observasi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya mengandalkan hasil kebun, tidak ada inisiatif untuk mengolah tanah menjadi sawah dan lain-lain. Hal ini menyebabkan warga sulit berkembang.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam membangun warga di desa-desa Kecamatan Sungaiambawang tidak semata-mata hanya dengan program aksi yang sifatnya pembangunan fisik, tetapi pemberdayaan masyarakat dengan mengubah pola hidup dan cara berpikir masyarakat merupakan permasalahan yang perlu ditangani. Untuk mengubah perilaku dan budaya serta adat-istiadat sebuah masyarakat bukanlah suatu pekerjaan yang mudah karena harus membutuhkan strategi yang tepat dan memerlukan waktu yang tidak singkat.

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bidang kesehatan adalah: melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif, dimana masyarakat lebih banyak dilibatkan dalam program yang dilakukan pemerintah, seperti mensosialisasikan pola hidup sehat, pelatihan perawatan keluarga, pelatihan teknologi pertanian modern dan sebagainya. Karena pendekatannya secara partisipatif, pelayanan kesehatan dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat yang dinamakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) diantaranya adalah Posyandu, Polindes, Pos Obat Desa (POD). Disamping itu, penyelenggaraan upaya kesehatan tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga melibatkan pihak swasta. Oleh

karena itu gambaran situasi ketersediaan tenaga kesehatan baik yang bekerja di sektor pemerintah maupun swasta perlu diketahui, dengan dilakukan identifikasi atau mendata potensi tenaga kesehatan yang bersumber dari masyarakat Kec. Sungaiambawang sendiri untuk didorong membuka praktik-praktik kesehatan, atau mendatangkan dari luar (swasta).

Saat ini jumlah dokter umum di Puskesmas Sungaiambawang adalah 1 orang, ini artinya Puskesmas masih kekurangan dokter umum dikarenakan Puskesmas Sungaiambawang notabene adalah Puskesmas rawat inap. Kekurangan tenaga kesehatan sangat berdampak pada kinerja hal ini dikarenakan adanya tumpang tindih tugas dan beban kerja yang harus diemban oleh masing-masing petugas kesehatan.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kecamatan Sungaiambawang bersama dengan Puskesmas Sungaiambawang dalam rangka menanggulangi permasalahan ketenagaan adalah (1) berupaya mengajukan tenaga PTT (pegawai tidak tetap) bagi dokter dan dokter gigi serta bidan desa. (2) penerimaan tenaga honorer daerah serta dibantu oleh tenaga magang. (3) membentuk komite kesehatan desa yang sebagai mitra puskesmas dalam menggali permasalahan kesehatan di desa, dan tenaga kader kesehatan yang membantu di posyandu masing-masing desa.

Tenaga-tenaga kesehatan yang dibentuk tersebut sangat membantu petugas kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan di desa-desa atau di RT/RW. Pembiayaan untuk menggaji atau memberikan upah lelah bagi tenaga-tenaga pembantu kesehatan yang terbentuk, mesti dianggarkan dalam prosedur operasional kegiatan (POK) pada masing-masing

bidang yang bersumber dari APBN, APBD dan sumber pembiayaan lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Identifikasi strategi pembangunan infrastruktur fisik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sungaiambawang dilakukan melalui beberapa hal di antaranya:
 - (1) strategi peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di daerah dan desa;
 - (2) strategi pengembangan dan pembangunan kawasan cepat tumbuh, yaitu program pembangunan kawasan industri dan pembangunan perumahan rakyat; dan
 - (3) strategi pengadaan transportasi poros trans kalimantan dan jalan sutra Kuburaya-Singkawang-Sambas.
2. Identifikasi strategi pembangunan pendidikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sungaiambawang adalah:
 - (1) menyediakan fasilitas pendidikan dasar 0 km dan menempatkan tenaga pendidikan di daerah-daerah yang terpencil,
 - (2) menambah sekolah-sekolah kejuruan (SMK),
 - (3) mengadakan program paket A dan B untuk mengatasi masyarakat buta huruf.
3. Identifikasi strategi pembangunan kesehatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sungaiambawang adalah: melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin, dkk. 2011. *Strategi Pembangunan Pedesaan Berbasis Lokal*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kusnadi. 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nilasari, Senja. 2014. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Nasution, Zulkarimen, 2007, *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya Edisi Revisi 6*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Pidarta, Made, 2007. *Perencanaan Pendidikan Partisipatori*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soetomo, 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Suharto, Edi, 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Suryono, Agus, 2013. *Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial*. Malang: Universitas Negeri Malang Press.
- Suradinata, Ermaya. 1998. *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Dalam Era Globalisasi*. Bandung: CV Ramadhan.
- <http://pontianak.tribunnews.com/2015/08/17/70-tahun-tanpa-listrik-warga-merasa-belum-merdeka>